

**RELEVANSI KEBIJAKAN *HUMAN-CENTERED DEVELOPMENT*  
DAN PERBAIKAN KUALITAS PENDIDIKAN DALAM  
PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA  
INDONESIA**

**Oleh:  
Ulber Silalahi<sup>52</sup>**

*Sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki rasionalitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki Indonesia untuk survive di era globalisasi. Namun demikian kebijakan pembangunan yang selama ini ditempuh Indonesia justru telah menempatkan pengembangan sumber daya manusia dalam area subordinatif dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga upaya pengembangan yang dilakukan tidaklah memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pemaknaan sumber daya manusia dalam hirarki semacam ini tentunya menempatkan Indonesia pada posisi rawan dalam kancah persaingan global. Kondisi inilah yang mendorong beralihnya paradigma pembangunan Indonesia pada paradigma *human-centered development* yang memberikan penekanan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kritis dan inovatif agar mampu mengaktualisasikan potensi diri sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.*

*Tulisan ini memandang bahwa upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan haruslah diarahkan pada perbaikan dalam tiga hal yakni peningkatan kualitas tenaga pengajar, perbaikan kurikulum dan manajemen pendidikan. Ketiga upaya pembenahan tersebut diterjemahkan ke dalam program yang lebih konkrit berupa pencaanangan visi pendidikan 2004 yang disertai dengan peningkatan anggaran pendidikan, pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi, Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan serta pemberlakuan otonomi pendidikan. Program-program tersebut diharapkan akan mampu menciptakan manusia Indonesia yang memiliki kompetensi akhlak, moral, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku kehidupan yang menguatkan mereka sebagai individu dan anggota masyarakat serta bangsa.*

---

<sup>52</sup> Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNPAR, Bandung , sedang studi lanjut S3 di UNPAD Bandung

## PENDAHULUAN

Sumberdaya manusia merupakan aset paling strategis bagi suatu bangsa dan negara. Ia bukan saja sebagai *comparative advantages* melainkan juga telah menjadi *competitive advantages*. Hal ini disebabkan kemajuan suatu bangsa dan negara bukan hanya bertumpu pada ketersediaan sumberdaya alam (*natural resources*) semata, namun sangatlah ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Kemajuan negara-negara barat atau Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, demikian juga di negara-negara yang disebut macan asia atau *new industrial state*, seperti Singapura, Korea, Taiwan, Hongkong, Cina, dan Malaysia sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang mereka miliki.

Kualitas sumberdaya manusia antara lain ditentukan oleh mutu dan tingkat pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas sumberdaya manusia rendah; makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi pula kualitas sumberdaya manusia. Hal ini berpengaruh terhadap cara pikir, nalar, wawasan, keluasan dan kedalaman pengetahuan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan lebih mudah memperoleh kesempatan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi, dan dengan penghasilan yang relatif tinggi akan dengan sendirinya dapat memelihara kesehatan yang relatif lebih baik. Dengan kata lain, kesehatan yang baik hanya dapat diperoleh dan ditingkatkan apabila memiliki penghasilan yang mencukupi, sedangkan penghasilan yang cukup bergantung pada pekerjaan yang dilakukannya dan kesempatan kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan akhirnya pekerjaan dengan penghasilan yang cukup ditentukan oleh tingkat pendidikan.

Berdasarkan tiga indikator tersebut, maka UNDP mengeluarkan *Human development Report (HDR)* berupa laporan tahunan tentang pembangunan manusia di seluruh dunia. HDR mengurutkan negara di dunia berdasarkan peringkat dari *Human Development Index (HDI)*. Dalam HDR tahun 1996 tampak bahwa dari 173 peringkat HDI, Indonesia menduduki urutan ke 102 dengan indeks 0,61 (penduduk yang kualitasnya rendah nilai HDI-nya mendekati 0, sedangkan yang baik mendekati 1). Sementara itu negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Filipina, sudah masuk peringkat antara 34 dan 53. Malaysia menduduki urutan ke 53 dan Singapura menempati urutan ke 34. Kemudian Korea Selatan pada peringkat 29, Cina peringkat 108, Sri Langka dalam urutan 97. Sementara berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh

UNDP tahun 2000 berdasarkan penelitian HDI, dari 173 negara di dunia, peringkat mutu pendidikan Indonesia berada pada urutan 109 posisi, Sebuah posisi yang menurun bila dibandingkan dengan urutan ke 105 pada tahun 1999. Posisi itu jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (urutan ke-24), Jepang (urutan ke-8), Malaysia (urutan ke-61), Thailand (urutan ke-76), dan Philipina yang menempati posisi ke 77. Cina urutan ke-99, Sri Lanka urutan ke-84, bahkan Vietnam yang relatif baru berkembang justru lebih baik dari Indonesia, yaitu menempati posisi ke-108.<sup>1</sup>

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia berdasarkan HDI dan usaha untuk mengembangkannya akan dicoba dijelaskan dalam paper ini dari perspektif kebijakan pembangunan dan pengembangan kualitas pendidikan.

## **PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL: MANUSIA SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI**

Rendahnya urutan Indonesia dibandingkan dengan negara- negara lain di Asia umumnya, dan di Asia Tenggara khususnya antara lain disebabkan pembangunan Indonesia hingga tahun 1990- an lebih bertumpu pada pembangunan ekonomi dan fisik, seperti di negara-negara berkembang lainnya yang disebut *production- centered development*. *Production-centered development* dilakukan dalam upaya mengatasi keterbelakangan dunia ketiga, termasuk Indonesia dengan mengejar pertumbuhan ekonomi karena diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kemajuan bangsa. Oleh Karena itu tidak mengherankan jika paradigma pembangunan saat itu didominasi oleh pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar ketertinggalan suatu bangsa.

Dalam kearifan pembangunan ini, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati pula oleh masyarakat sampai lapisan bawah melalui "*trickle down effect*". Paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni tampaknya menjadi paradigma yang dominan di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Paradigma ini memandang pembangunan nasional sebagai identik dengan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Paradigma ini memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun ternyata pertumbuhan ekonomi tidak selalu beriringan dengan pertumbuhan kesejahteraan mayoritas penduduk. Fenomena yang muncul kemudian adalah timbulnya berbagai kesenjangan di masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa kesenjangan yang semakin melebar baik antar daerah, antar sektor dan antar strata justru banyak terjadi di negara yang sedang membangun dengan menggunakan paradigma ini. Kesenjangan itu muncul antara lain karena mekanisme distribusi (sumberdaya) tidak berfungsi dengan baik. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut maka timbul pemikiran bahwa pertumbuhan haruslah secara beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan merata. Strategi demikian dikenal dengan *redistribution-growth development*.<sup>2</sup> Dengan kebijakan ini ternyata tetap terjadi kesenjangan. Mekanisme distribusi tetap tidak berjalan dengan baik. Prosentase hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih besar justru dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja.

Untuk mengatasi mekanisme distribusi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan tersebut, maka pada tahun 1970-an muncul konsep pendekatan kebutuhan pokok (*basic need approach*) yang memberi tekanan pada distribusi hasil pembangunan. Program pemenuhan *basic needs* (kebutuhan pokok) juga menjadi acuan dalam perencanaan ekonomi nasional di banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Tetapi pendekatan kebutuhan dasar ini tidak membawa hasil optimum bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam paradigma pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan pokok peranan pemerintah sangat dominan dan kebijakan yang dihasilkan bersifat *top-down* serta sangat berorientasi pada produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada *growth-generating sectors*. Mekanisme pasar menjadi tumpuan dalam mencapai pertumbuhan.<sup>3</sup> Dalam perspektif pengembangan sumberdaya manusia tampak bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui *centrally-composed blueprint plan* yang dirumuskan oleh teknokrat, dan alokasi sumber pembangunan yang sentralistis cenderung meng-cripple-kan potensi masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan merupakan *delivered development* yang cenderung menumbuhkan hubungan dependensi antara rakyat dan proyek pembangunan atau antara rakyat dan birokrat. Oleh karena itu sifatnya menjadi *disempowering*, dan tidak menekankan kemampuan masyarakat untuk berusaha mengaktualisasikan potensinya.<sup>4</sup>

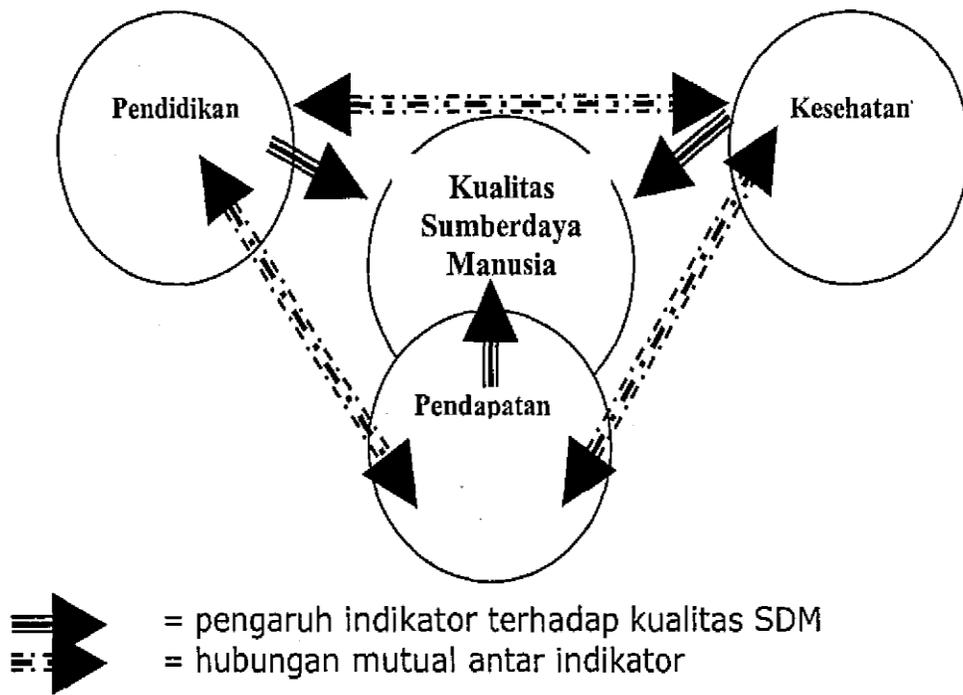
Jadi ada kecenderungan universal di negara berkembang bahwa pada kondisi awal negara tersebut, dimensi pembangunan ekonomi (juga dimensi pembangunan politik) menduduki posisi sentral dalam pembangunan nasional, termasuk Indonesia. Dalam periode ini pembangunan yang bertumpu pada manusia belum mendapat perhatian yang serius atau belum mendapat tempat yang layak dalam pembangunan nasional. Tetapi pada tahap pembangunan selanjutnya, dimensi-dimensi pembangunan lain, seperti dimensi SDM, menjadi bagian integral dari realitas pembangunan yang bersifat multidimensional. Paradigma kebijakan pembangunan seperti ini yang mulai dikembangkan pada tahun 1980-an di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, disebut *human-centered development*, pembangunan yang bertumpu pada manusia,.

Dengan kata lain, meskipun pembangunan sumber daya manusia merupakan dimensi yang seringkali menduduki posisi periferal pada pembangunan nasional suatu negara, namun dalam perkembangannya terjadi peningkatan relevansi dimensi sumberdaya manusia dalam pembangunan. Itu dilakukan oleh kesadaran bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan investasi *human capital* yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*. Strategi pembangunan yang bertumpu pada manusia baru dikembangkan di Indonesia dan itupun baru merupakan sentuhan-sentuhan awal dan mendapat tempat yang belum begitu dominan hingga akhir pemerintahan orde baru, tidak mengherankan jika posisi Indonesia anjlok jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan Asia Tenggara, karena indikator kinerja pembangunan SDM yang tercantum dalam HDI pada tahun 1990-an mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli atau akses ke sumber daya ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup, dan tidak lagi berdasarkan pendapatan per kapita atau GNP semata. Dengan kata lain, karena pengembangan sumberdaya manusia belum menjadi faktor determinan dalam kebijakan nasional maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia adalah terburuk di Asia Tenggara.

Seperti telah dikemukakan, bahwa ada tiga pilihan publik (*public choices*) utama yang dianggap paling penting untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu kesehatan (panjang umur dan sehat), pendidikan, dan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup (memiliki akses ke sumberdaya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak). Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP (*United Nation Development Program*) menyusun suatu indeks komposisi berdasarkan tiga indikator, yaitu angka harapan hidup pada

waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa, rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur tingkat kesehatan dan panjang umur, indikator angka melek huruf penduduk dewasa mengukur tingkat pendidikan, dan indikator daya beli mengukur kemampuan mengakses ke sumber daya ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

Bagan 1: Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia



Hasil pengukuran ketiga indikator tersebut membentuk apa yang disebut *Human Development Index* (HDI) yang mulai dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 di mana mengukur keberhasilan program pembangunan suatu negara tidak lagi berdasarkan GNP (*Gross National Product*) per kapita seperti banyak digunakan sebelum HDI dipublikasikan. Misalnya, *World Development Report* (WDR) tahun 1978 sampai dengan 1995, menggunakan indikator utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Indikator utama adalah GNP yang digunakan untuk membagi negara-negara di dunia ini menjadi negara miskin atau kaya. Dulu orang mengevaluasi hasil pembangunan dengan membandingkan pendapatan per kapita, atau angka pertumbuhan perekonomian, dan kemudian dengan melihat distribusi pendapatan.

Evaluasi pembangunan yang melihat pada pendapatan per kapita, angka pertumbuhan pendapatan nasional, dan kemudian distribusi pendapatan tidak lepas dari konsep pembangunan (perekonomian) yang berkembang pada saat itu. Pada saat itu, pendapatan per kapita, angka pertumbuhan, pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan bahkan sudah hampir diterima sebagai "baku". Berbagai analisis untuk mengelompokkan negara sering menggunakan pendapatan per kapita sebagai criteria, padahal tingkat pendapatan yang tinggi tidak dapat dijadikan patokan tingginya tingkat pembangunan manusia.<sup>6</sup> Peningkatan pendapatan per kapita bangsa seringkali tidak dibarengi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, seperti tercermin dari banyak data. Pada waktu pendapatan per kapita negara Indonesia mencapai USD500 tahun 1989, rata-rata angka harapan hidup adalah 61,5 tahun dan angka melek huruf orang dewasa (10 tahun ke atas) adalah 77 persen. Dibandingkan dengan Sri Lanka, misalnya, pada waktu pendapatan per kapita yang sama, yaitu USD500 pada tahun 1991, rata-rata angka harapan hidup di Sri Lanka sudah mencapai 71,2 tahun dan angka melek huruf orang dewasa mencapai 89 persen.

Singkatnya, jika sebelum tahun 1990-an banyak ahli dan lembaga internasional mengelompokkan negara berdasarkan pada pendapatan per kapita, maka *Human Development Report* (HDR) membuat urutan negara tidak berdasarkan pada pendapatan per kapita, melainkan berdasarkan HDI karena dalam banyak hal pendapatan nasional tidak selalu representatif untuk aspek pembangunan yang lain. Dalam konteks ini ada upaya untuk mengaitkan pertumbuhan ekonomi<sup>7</sup> suatu negara dengan pembangunan manusia, sebab pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa pembangunan manusia; tingkat pendapatan yang tinggi tidak dapat dijadikan patokan tingginya tingkat pembangunan manusia. Sebuah indeks sebagai suatu pengukuran agregat pembangunan manusia dibuat untuk menghasilkan peringkat dan adanya peringkat berarti suatu evaluasi relatif dalam suatu kelompok, bukan individu.

## **PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL: MANUSIA SEBAGAI FOKUS PEMBANGUNAN**

Ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Hal ini

disebabkan manusia adalah sumberdaya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Secara teoritis maupun empiris, betapa SDM berperan sebagai sumber kemajuan yang dicerminkan dalam ukuran ekonomi melalui pertumbuhan. Modal manusia ini yang paling utama dihasilkan oleh pendidikan. Pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Kualitas manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan seperti itu akan membawa Indonesia tumbuh dan maju menjadi bangsa besar yang sejajar dengan bangsa maju lainnya.<sup>8</sup>

Pentingnya unsur manusia dalam pembangunan tampak secara jelas sejak diterbitkannya HDR oleh UNDP tahun 1990 di mana dalam setiap laporannya selalu ditekankan bahwa pembangunan manusia merupakan usaha untuk *"increasing people's choices"*.<sup>9</sup> Pentingnya unsur manusia dalam pembangunan di Indonesia sesungguhnya telah tampak secara jelas dirumuskan dalam GBHN di mana hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari upaya pembangunan. Komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan manusia sudah lama digariskan dalam GBHN sehingga Indonesia sesungguhnya lebih maju selangkah dalam pemikiran mengenai pembangunan manusia daripada UNDP. Dalam GBHN selalu tertuang bahwa tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya baik materil maupun spiritual. Sayangnya komitmen politik tersebut tidak pernah diterjemahkan secara konkrit dalam kebijakan pembangunan Indonesia dalam tataran realitas. Dalam rumusan GBHN 1993 disebut: "Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumberdaya manusia...". Dari rumusan ini jelas terjadi pergeseran paradigma pembangunan yang tadinya amat menekankan pada dimensi pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan menuju pada paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan sumberdaya manusia dan terjadi pergeseran keterkaitan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia dari keterkaitan subordinatif menjadi komplementer.

Pembangunan sumberdaya manusia atau menjadikan manusia sebagai fokus pembangunan adalah penting. Itu tampak dari empat perspektif tentang peranan pembangunan sumberdaya manusia dalam pembangunan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- i. Perspektif Functionalist. Perspektif ini menganggap bahwa pendidikan sebagai komponen utama pembangunan SDM harus berfungsi sebagai wacana untuk mewariskan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Melalui pendidikan, individu-individu akan mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk hidup dalam masyarakat yang makin kompleks. Menurut perspektif ini, kualitas manusia "diprogram" melalui pendidikan untuk dapat menyesuaikan dengan logika masyarakat industri dan tuntutan pasar.
- ii. Perspektif Liberal. Dalam perspektif ini pembangunan sumberdaya manusia - lebih dari sekedar mendorong konformitas individu dengan tata nilai yang ada, akan tetapi harus mendorong individu untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia - melalui pengembangan talenta fisik, emosi, spirit dan intelektualnya. Individu harus belajar melalui pengalamannya, dan tidak semata-mata melalui apa yang dikatakan kepadanya. Dengan demikian mereka akan mengembangkan kemampuannya untuk melihat secara kritis situasi yang objektif melengkapinya.
- iii. Perspektif Sosial-Demokratis. Perspektif ini melihat peranan pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan persamaan dan keadilan sosial. Karenanya, apabila pendidikan gagal dalam mewujudkan *equality of opportunity*, maka hal itu akan berarti kegagalan dalam mengembangkan potensi industri.
- iv. Perspektif Marxist. Perspektif ini melihat di dalam masyarakat yang kapitalis, pembangunan SDM merupakan proses reproduksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menguasai tenaga kerja dan faktor produksi. Kurikulum pendidikan menyimpan fungsi-fungsi tersembunyi untuk menghasilkan tenaga kerja yang pasif, taat, yang menerima struktur kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Perspektif ini melihat pembangunan SDM dalam konteks sistem kapitalisme sebagai wacana untuk melestarikan dan melegitimasi kesenjangan sosial.

Bahwa SDM memiliki posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan agaknya tidak ada yang menyanggah. Tetapi pemaknaan pengembangan SDM memang dapat bersifat mendua dan dapat bersifat *misleading*<sup>11</sup> Pertama, dalam perpektif pembangunan yang berpusat

pada produksi, pembangunan SDM cenderung menempatkan manusia sebagai resource pembangunan. Nilai atau harga manusia dalam konteks ini ditentukan oleh relevansi kontribusinya pada proses produksi. Kualitas manusia "diprogramkan" sedemikian rupa agar dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, atau kebutuhan masyarakat industrial. Hakekat manusia di sini cenderung dilihat sebagai salah satu bentuk faktor produksi semata yang melengkapi faktor produksi lain.

Dalam kaitan dengan *human-centered development*<sup>12</sup>, ini menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekedar membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan. Pengembangan SDM di dalam perspektif ini menekankan pentingnya pemberdayaan manusia (*empowering people*),<sup>13</sup> kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. Proses ini menumbuhkan *conscientization* manusia, kesadaran akan kediriannya (*self-hood*) yang memungkinkan mereka untuk secara kritis melihat situasi sosial yang melingkupi eksistensinya. Pengembangan SDM dalam perspektif ini akan membentuk manusia yang memiliki kesadaran bahwa masyarakat di mana mereka hidup bukan sesuatu struktur yang statis, tata yang tertutup, suatu *given reality* yang harus mereka terima begitu saja, yang menuntut dirinya untuk beradaptasi sepenuhnya kepada sistem. Pengembangan SDM harus mampu membentuk manusia yang memiliki kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural, dan sebagainya dari sistem yang ada dan memiliki inovasi untuk mencari alternatif-alternatif pemecahannya. Dapat dikatakan bahwa dalam perspektif ini, pengembangan SDM dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup, yaitu kualitas manusia untuk bisa memandang hidup dengan suatu kesadaran tentang makna yang dia berikan mengenai apa itu hidup.<sup>14</sup>

Kesadaran akan harkat dan martabat manusia dalam proses produksi baru mulai direspon secara serius sesudah perang dunia kedua tahun 1950-an. Kesadaran tersebut tumbuh karena kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari revolusi industri telah menimbulkan efek negatif terhadap manusia yaitu proses dehumanisasi. Penempatan manusia sebagai fokus pembangunan di Indonesia baru dimulai pada tahun 1980-an. Hanya meskipun dalam GBHN menekankan posisi instrumental dan posisi terminal manusia dalam rangka kebijakan pembangunan SDM, akan tetapi agaknya didalam realita penafsiran yang pertamalah yang lebih menonjol karena pada

saat itu era pembangunan Indonesia memasuki era teknologi canggih dalam rangka mencapai *competitive advantage*.

Meskipun demikian, penempatan atau masuknya dimensi manusia dalam kebijakan pembangunan nasional mulai membawa hasil bagi perbaikan pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks pendidikan secara umum dapat dikatakan Indonesia telah berhasil dalam upayanya untuk membangun sumberdaya manusia. Jika pada tahun 1970 angka kemampuan membaca dan menulis anak usia 15 tahun ke atas hanya 54 % maka pada tahun 1990 angka itu meningkat menjadi 82 %. *School enrollment ratio* (SER), yaitu rasio antara murid yang terdaftar pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah untuk tingkat SD meningkat dari 72 % di tahun 1975 menjadi 98 % dalam tahun 1980-1990. Sedang ratio guru murid menurun dari 29 % di tahun 1980 menjadi 23 % di tahun 1988-1990. Sementara dari indikator kesehatan tampak, bahwa angka kematian bayi telah menurun tajam dari 145 per 1.000 kelahiran di tahun 1971 menjadi 109 di tahun 1980 dan 71 di tahun 1990.<sup>15</sup> Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta aksara telah menurun dari sekitar 40 persen pada tahun 1971 menjadi kurang dari 14 persen pada tahun 1995. Tetapi Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Korea Selatan, Thailand, Philipina, Sri Langka, dan Singapura, di mana angka buta aksaranya sudah sangat rendah, yaitu berkisar dari 2 sampai 12 persen.

Dari indikator kesehatan, angka harapan hidup waktu lahir penduduk Indonesia terus meningkat dari rata-rata 45,7 tahun pada tahun 1967 menjadi rata-rata 63,5 tahun pada tahun 1995. Tetapi sekali lagi dibandingkan dengan angka harapan hidup di antara negara-negara ASEAN (tahun 1992), yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, dan Brunei masing-masing adalah 74,2 tahun, 70,4 tahun, 68,7 tahun, 64,6 tahun dan 74,0 tahun, maka Indonesia masih jauh tertinggal.

Pembangunan nasional yang didorong oleh dan berpola pada cita-cita dan persepsi nasional di abad 21 berlangsung dalam suatu lingkungan globalisasi. Terjadi suatu intensitas dari *push-effect* (pembangunan nasional) dan *pull-effect* (perkembangan global) dari interaksi, malahan intruisi dari persepsi-persepsi dan nilai-nilai ke dalam masing-masing negara. Globalisasi membuat dunia menjadi "*one big state*", "*one big factory*", dan "*one big market-place*".

Kebhinekaan nasional menjadi kebhinekaan global. Tuntutan globalisasi dengan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas mengakibatkan diperlukannya suatu program pendidikan, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Diperlukan sumberdaya manusia Indonesia yang rasional, profesional, produktif, kreatif, inovatif, dan untuk itu diperlukan peningkatan pendidikan dan keterampilan. Tetapi itu semua baru mendayagunakan manusia Indonesia sebagai sumber daya.

Memang ada kecenderungan bahwa dalam perspektif pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, pengembangan SDM terbatas pada masalah-masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, mortalitas dan morbiditas, *link and match*, *social absorption capacity*, dan sebagainya. Pandangan ini valid sepanjang mengikuti premis-premis yang menekankan pada perwujudnya nilai-nilai produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan optimasi. Pandangan ini merefleksikan perspektif fungsionalis, dimana pandangan ini lebih menempatkan manusia di dalam posisi instrumental dalam pembangunan nasional.

Persoalannya manusia itu bukan sekedar alat produksi, melainkan dari dirinya dan untuk dirinya sendiri ia memiliki harkat dan martabat. Artinya, perlu kesadaran akan harkat dan martabat manusiawi dan disinilah perbedaan antara sumberdaya manusia sebagai faktor pendukung produksi dan faktor produksi lainnya. Kecenderungan ini sangat jelas tampak dalam paradigma pembangunan manusia di Indonesia. Sumberdaya manusia telah menjadi bagian dalam paradigma pembangunan. Telah terjadi pergeseran pemikiran tentang kebijakan pembangunan di Indonesia, yaitu dari *production-centered development* ke *distribution-growth development*, kemudian ke *basic need development*, dan akhirnya ke *human-centered development*. Dalam model *human-centered development* sangat jelas tampak bahwa martabat manusia menjadi unsur yang sangat penting.

Teori endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan serta dinamika ekonomi bersumber dari dalam, dan unsur dalam ini mewujudkan diri dalam efisiensi dan produktivitas masyarakat. Makin besar peran efisiensi dan produktivitas sebagai sumber pertumbuhan, maka makin besar pula unsur pembangunan. Premis pokoknya, antara lain pengenalan bahwa pasar tidak bekerja sempurna dan adanya eksternalitas dalam perekonomian. Teknologi dan penemuan-penemuan baru itu memberi eksternalitas bagi perekonomian.<sup>16</sup>

Banyak studi empiris dilakukan untuk melihat kaitan antara kualitas SDM dan pertumbuhan. Denison (1962), misalnya, menemukan adanya sumbangan yang besar dari peningkatan years of schooling terhadap pertumbuhan di AS. Barron (1991) serta Mankiw, Romer, dan Weil (1992) menyatakan bahwa partisipasi pendidikan dan investasi yang cukup besar untuk pendidikan pada tahun 60-an merupakan faktor yang penting dalam menjelaskan variasi pertumbuhan negara-negara di dunia selama 30 tahun terakhir. Mereka memperlihatkan bahwa kualitas SDM menyumbang secara cukup berarti bagi pertumbuhan. Sumbangan itu kira-kira sama dengan sumbangan *physical capital*.<sup>17</sup>

Paradigma kebijakan pembangunan yang mendasarkan diri pada logika *human-centered development* menjadikan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan aktualisasi potensi di dalam berbagai dimensinya sebagai nilai yang harus diwujudkan melalui proses pembangunan sebagaimana dilansir oleh teori endogen. Kearifan, inovasi dan daya kreasi manusia yang mempunyai potensi untuk tumbuh secara eksponensial merupakan *inexhaustible determinant* proses pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya *human-centered development* merupakan *conditio-sine qua non* dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Di dalam konteks globalisasi, pembangunan nasional berdasarkan *human-centered development* menjadi makin relevan, agar negara dan bangsa Indonesia dapat memainkan peranan sebagai subjek yang mandiri dalam interaksi global. Dalam proses mencapai momentum, pembangunan SDM akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan. Kondisi semacam itu akan menempatkan logika *human centered development* pada posisi sentral pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Dengan menempatkan pengembangan sumberdaya manusia dalam program-program pembangunan atau pembangunan yang berpusat atau berorientasi pada manusia untuk meningkatkan kemampuan dan harkat dan martabat manusia, maka untuk menghadapi tantangan abad 21, manusia Indonesia yang kita harapkan menurut Frans Seda<sup>19</sup> adalah manusia yang:

- a. Berwawasan dan berpikiran global-nasional, tetapi mampu bertindak lokal. Artinya, mampu memandang masalah di dalam konteks global-nasional. Namun, dalam mengambil tindakan tetap memperhatikan keadaan lokal yang secara nyata dihadapinya. Dalam konteks ini ada satu pernyataan: "*think globally, act locally*".

- b. Mampu bekerja secara rasional-profesional tanpa alienasi kultural. Artinya, dibekali daya pemikiran rasional dan kemampuan profesional tanpa harus mengasingkan diri dari budaya, melainkan memahami dan menggali nilai budaya yang sesuai.
- c. Mampu bekerja dan bekerja sama secara produktif tanpa kehilangan kehangatan ikatan manusiawi. Potensi manusia perlu dikembangkan secara optimum. Namun, hakikat insani yang saling membutuhkan harus tetap dipertahankan. Hubungan yang akrab antarpribadi haruslah dipupuk karena hal ini merupakan sumber kekuatan pribadi manusia.
- d. Perilakunya dipimpin oleh hukum dan nilai etik. Masyarakat yang modern memperhatikan hukum sebagai landasan untuk bertindak. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang punya harkat dan martabat yang luhur, nilai etik haruslah dijunjung tinggi.

## **PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN: SUATU HARAPAN**

Tantangan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia bermuara pada satu masalah, yakni masalah pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam buku *Megatrends 2000* diuraikan bahwa abad ke-21 adalah abad dari *Pacific Rim*, dan dinyatakan bahwa "*education is the Pacific Rim's Competitive Edge*". Dikatakan pula, bahwa negara-negara yang berpenduduk padat seperti Cina Daratan dan Indonesia menghadapi "*enormous challenges in education*". Mereka harus "*device new ways to educated millions of students*".<sup>20</sup>

Pengembangan SDM melalui pendidikan itu penting. Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Oleh sebab itu pendidikan memerlukan penanganan yang sangat serius dari pemerintah dan semua komponen masyarakat, terutama para penyelenggara institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Persoalannya, hingga awal abad 21 mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ini menjadi satu indikator yang memberi sumbangan pada rendahnya peringkat Indonesia

berdasarkan HDI dalam HDR yang dibuat oleh UNDP. Memang harus diakui bahwa Indonesia telah berhasil membangun SDM-nya. Secara kuantitas telah terjadi peningkatan pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, kualitas pendidikan Indonesia termasuk paling rendah. Kualitas pendidikan negara Vietnam sebagai negara yang sering dilanda perang masih berada di atas Indonesia. Hasil penelitian lembaga konsultan di Singapura (PERC-The *Political and Economics Risk Consultancy*), akhir 2001, menyebutkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini berada di urutan ke 12 dari 12 negara di Asia yang disurvei. Survei PERC yang didasarkan pada kualitas pendidikan yang menjadi tenaga kerja dengan argumentasi bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas didasarkan atas sistem pendidikan yang berkualitas itu menempatkan Korea Selatan di urutan pertama, Singapura kedua, dan Jepang ketiga, Vietnam menempati urutan ke-11 dan Indonesia berada pada urutan 12.

Penyebabnya antara lain rendahnya mutu tenaga pengajar (tingkat profesionalisme pengajar yang rendah), kurikulum, dan manajemen pendidikan. Lebih umum lagi, mungkin karena hal itu merupakan dampak berkelanjutan dari karakteristik pendidikan di Indonesia. Sebagaimana diidentifikasi oleh tim peneliti *Institut of Southeast Asian Studies* pada tahun 1992 maka karakteristik pendidikan Indonesia adalah (i) titik tekannya lebih pada "*universal education*" daripada "*vocational education*"; (ii) lebih menekankan kuantitas daripada kualitas; (iii) tidak ada "*streaming*" dalam seleksi siswa pendidikan menengah; (iv) terdapat *mismatch* antara *supply output* pendidikan dan *demand* tenaga kerja, dalam arti terdapat *excess demand* pada pendidikan SD atau di bawahnya, dan *oversupply* pada pendidikan sekunder dan tertier; (v) rendahnya kualitas pendidikan *science* dan matematika; dan (vi) methodidaktik yang digunakan tidak kondusif bagi proses *empowerment*, pembentukan kesadaran baru tentang *self* dan *a sense of dignity*.<sup>21</sup>

Jika indikasi kualitas sumberdaya manusia antara lain ditentukan oleh mutu pendidikan, maka wajar jika dikatakan bahwa kualitas sumberdaya manusia Indonesia rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di negara-negara Asia Tenggara. Termasuk ranking universitas, indeks pengembangan manusia, dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penilaian Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 2000, kualitas SDM Indonesia menempati urutan ke-109 dari 174 negara, atau

jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya yakni Singapura (24), Malaysia (61), Thailand (76), Filipina (77), dan Vietnam (108). Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1990 di mana sebagian besar (70%) berpendidikan SD dan bekerja di sektor pertanian (47,3%). Akibatnya produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan juga rendah, yaitu sebesar USD1.400 per kapita dalam tahun 1990 dan lebih rendah dari negara Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, yang pada akhirnya menyebabkan daya saing juga rendah karena kemampuan untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan teknologi sangat terbatas

Rendahnya mutu pendidikan yang berimplikasi pada rendahnya mutu SDM Indonesia menjadi masalah besar bagi Indonesia memasuki pasar bebas dan globalisasi. Sebab era globalisasi sangat mengutamakan dan mengandalkan kualitas sumberdaya manusia untuk memenangkan kompetisi global. Dalam persaingan global maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia mutlak harus diperhatikan dan menjadi prioritas karena dalam memenangkan persaingan global pada akhirnya ditentukan oleh faktor manusia. Agar bangsa Indonesia tidak semakin terpuruk dalam era globalisasi, maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia di berbagai sektor baik publik maupun privat harus ditingkatkan sehingga menjadi manusia yang potensial dan memiliki kemampuan kompetitif yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, setidaknya di tingkat Asia atau Asia Tenggara. Seiring dengan hal tersebut, maka guna menghadapi persaingan mutu sumberdaya manusia menjelang pemberlakuan pasar bebas (AFTA) 2003, Mendiknas menghimbau, agar semua kampus perguruan tinggi (negeri/swasta) di tanah air harus tetap mengedepankan peningkatan kualitas lulusannya. Komitmen dari kampus sangat diperlukan agar SDM Indonesia pada AFTA mendatang dapat bersaing dengan negara lainnya.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Frans Seda mengatakan bahwa di samping masalah bagaimana menghasilkan para insinyur, ekonom, ahli hukum, pertanian, dan sebagainya, dalam jumlah yang besar, maka perlu pula diperhatikan bahwa pembinaan SDM juga harus berakar pada pengembangan harkat/martabat manusia. Di dalam pendidikan masalah pembinaan harkat dan martabat ini berintikan pada tiga dasar yang harus diperhatikan dalam sistem pendidikan nasional, yakni pengembangan daya absorpsi (ilmu dan teknologi), dan daya adaptasi secara kritis, pengembangan daya kreasi yang berwawasan dan pengembangan daya komunikasi yang bermutu, bertanggungjawab dan terbuka. Untuk semuanya ini tidak diperlukan suatu kurikulum

yang padat, melainkan suatu kurikulum yang bermanfaat dan benar-benar mendidik.<sup>24</sup> Selain kualitas pengajar, metode pengajar, dan fasilitas yang disediakan justru kandungan dari ilmu dasar jauh dari yang seharusnya dalam kurikulum yang diterapkan di Indonesia.<sup>25</sup>

Dengan demikian kualitas sumberdaya manusia dengan indikator pendidikan tidak cukup dilihat dari banyaknya melek huruf (kuantitas) tetapi juga tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki (kualitas pendidikan). Kita tidak boleh puas bahwa tingkat pendidikan penduduk sudah mencapai SMA, misalnya. Tapi harus dilihat bagaimana kinerja pendidikan yang dilakukan di Indonesia, bagaimana kurikulumnya dan bagaimana mutu pendidikan secara umum. Orang dapat saja berpendidikan tinggi tapi cara dia memandang hidup tidak mencerminkan tingginya pendidikan. Pada hal selalu dikatakan pendidikan membangkitkan kemandirian dan rasionalitas. Pendidikan penting karena menjadi satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup.

Meskipun disadari bahwa pendidikan penting untuk meningkatkan kualitas SDM, tetapi pemerintah tampaknya terkesan mengabaikan masalah pembangunan pendidikan. Hal itu bisa dilihat dari fakta rendahnya alokasi anggaran pembangunan pendidikan di dalam APBN 2001. Anggaran belanja dalam APBN 2001 yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan, yaitu sebesar Rp. 13,9 triliun, atau sekitar 4,4 % dari total APBN 2001 sebesar Rp 315,7 triliun. Dengan alokasi anggaran pendidikan itu diyakini bahwa Indonesia sulit untuk bisa mengeliminir berbagai masalah di bidang pendidikan yaitu rendahnya kualitas SDM. Idealnya anggaran pendidikan sebesar 25 % dari APBN. Masalah pendidikan di Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi sekarang ini juga sedang dihadapkan dengan tingginya angka pengangguran yang hingga tahun 2000 lalu sudah mencapai 59,84 % dari 95,7 juta angkatan kerja. Dari total angkatan kerja tersebut, hanya sekitar 2,9 % yang berpendidikan lulusan program Diploma dan 2,4 % lulusan program Strata Satu (S1).<sup>26</sup>

Meskipun demikian, indikasi pengembangan mutu SDM Indonesia tampaknya ada harapan. Pertama, meskipun baru dalam tataran pernyataan politis (*political statement*), tahun 2004 mendatang Indonesia menargetkan naik kelas ke peringkat 10 se Asia dalam hal mutu pendidikannya. Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan melakukan terobosan dalam sistem, manajemen dan kebijakan pendidikan nasional, atau mencakup segi *hardware* dan *software* pendidikan nasional secara komprehensif. Mengacu kepada institusi pendidikan di

Britania, misalnya, terdapat enam kriteria utama penyelenggaraan pendidikan yang dipertimbangkan dalam pengkajian mutu/kualitas, yaitu:<sup>27</sup>

- Rancangan kurikulum isi dan pengorganisasian;
- Mengajar, belajar dan ujian;
- Kemajuan mahasiswa dan pencapaiannya;
- Sarana belajar (misalnya: IT, laboratorium, peralatan, perpustakaan, dan lain-lain);
- Jaminan dan peningkatan kualitas.

Tingkat pendidikan dasar dan menengah menjadi fokus pertama dan utama. Yang pertama, karena keterampilan membaca siswa SD (kelas IV) di Indonesia berada pada peringkat terendah di Asia Timur setelah Philipina, Thailand, Singapura, dan Hongkong. Dalam hal kedua tampak bahwa angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan SLTP (usia 13-15 tahun) hanya sekitar 50 %. Artinya, 50 persen anak-anak Indonesia pada usia ini belum menikmati pendidikan, hal ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga.

Kedua, adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan anggaran pembangunan Depdiknas naik 28 % dari Rp. 8.868 trilyun pada 2001 menjadi Rp. 11.352 trilyun pada 2002. Dari jumlah itu, Rp 7.083 trilyun merupakan rupiah murni dan Rp. 4.268 trilyun merupakan pinjaman luar negeri.

Ketiga, adanya keinginan Depdiknas untuk memberlakukan kurikulum berbasis kompetensi pada 2002. Banyak pihak melihat bahwa kurikulum adalah salah satu biang keladi utama dari rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kompetensi itu mencakup akhlak, moral, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat serta bangsa. Basis kompetensi tersebut sejalan dengan empat pilar pendidikan yang diusulkan oleh UNESCO untuk dijadikan acuan badan pengelola pendidikan negara di dunia, yakni belajar menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, hidup bersama, dan mengenal diri sendiri. Keempat pilar ini perlu dipadukan dengan yang lain (sebagai muatan lokal) sehingga terwujud manusia yang utuh dan dapat memantapkan keberadaannya, menjaga kelangsungan hidup, dan memanfaatkan alam semesta. Dengan kata lain, kompetisi global, termasuk dunia pendidikan menuntut kompetensi, tetapi keberagaman tiap daerah di Indonesia tetap dihargai.

Kebijakan itu tercermin dalam Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (SMBS) yang membuat penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan sendiri kurikulum sekolahnya dengan tetap mengutamakan kualitas universal dengan standar internasional. Sebab penguasaan Iptek tidak dapat dilakukan jika tidak menguasai ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi.<sup>28</sup> Ini ada kaitannya dengan fungsi pendidikan yang lebih esensial, yaitu sebagai instrumen untuk mengembangkan potensi kemanusiaan yang memberi kemampuan kepada anak didik untuk secara kritis dan kreatif melihat realitas objektif yang ada, dan mentransformasikannya.<sup>29</sup>

Keempat, adanya kemauan politik pemerintah yang dihasilkan dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (rakorbidkesra) pada tanggal 6 Maret 2002 untuk membuat gerakan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, atau Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan. Gerakan ini akan dikerjakan selama lima tahun dimulai pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2002. Ini dilakukan dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan Indonesia rendah dan perlu diambil langkah yang tegas dan konkrit agar kedepan kita tidak hanya menjadi bangsa kuli.<sup>30</sup>

Kelima, mulai diberlakukannya otonomi pendidikan di mana penyelenggaraan pendidikan jenjang dasar sampai dengan jenjang menengah termasuk pendidikan luar sekolah menjadi tanggungjawab daerah kabupaten/kota. Dengan demikian maka intervensi pemerintah pusat semakin terbatas dan daerah akan berkompetisi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Sementara kebebasan institusi pendidikan diharapkan akan menghasilkan pendidikan yang kompetitif dalam kualitas. Bagaimanapun juga pada akhirnya institusi pendidikan yang tidak mengutamakan kualitas akan ditinggalkan oleh rakyat sebagai pengguna jasa pendidikan dan produsen sebagai pengguna lulusan.

## **PENUTUP**

Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia sangat rumit dan multidimensi. Tetapi di antara berbagai aspek yang perlu diperhatikan, maka kebijakan pembangunan yang bertumpu pada manusia atau menjadikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan serta perbaikan mutu pendidikan merupakan aspek prioritas yang perlu mendapat perhatian.

Tanpa menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan akan membuat manusia tetap hanya sebagai objek pembangunan, sebagai alat produksi sehingga akan menghasilkan

proses dehumanisasi. Demikian juga tanpa perbaikan mutu pendidikan, maka mutu sumberdaya manusia yang dihasilkan oleh institusi pendidikan Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara lain, khususnya negara tetangga. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas pendidikan yang rendah (anggaran, proses, sarana dan prasarana, profesionalisme guru) dan tidak ditangani dengan serius telah menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Jika kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih rendah, maka Indonesia tidak akan mampu menjadi pemain dalam persaingan sumberdaya manusia dalam pasar bebas AFTA dan globalisasi. Jika demikian maka akhirnya masyarakat Indonesia akan merasa teralienasi di "rumah"nya sendiri, tidak mampu menjadi "tuan" di rumahnya. Tanpa usaha pengembangan SDM secara "*all out*", maka bangsa ini hanya menjadi pemain papan bawah dalam persaingan global.

Apa yang menjadi kunci keberhasilan negara-negara di Asia yang berkembang cepat, dimulai dari Jepang, kemudian Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura, ialah memberikan penekanan besar pada penguatan kualitas manusia. Dengan sumberdaya alam yang terbatas dan hambatan yang mereka hadapi dalam ekspornya ke Barat, mereka dapat tetap memelihara daya saing dan tingkat pertumbuhan yang menakjubkan.<sup>31</sup>

\*\*\*\*\*

## CATATAN KAKI

---

<sup>1</sup> Media Indonesia, 29 Maret 2001.

<sup>2</sup> Tentang bagaimana memadukan pertumbuhan dan pemerataan lihat Ginandjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

<sup>3</sup> Moeljarto Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 8.

<sup>4</sup> Ibid, h. 10.

<sup>5</sup> Nur Hadi Wiyono dalam *Warta Demografi*. Taun ke-26, Nomor 2, 1996, h. 5.

<sup>6</sup> Ibid, 24.

<sup>7</sup> Tentang strategi pertumbuhan ekonomi, Lihat Fred W. Riggs (editors). 1994. *Administrasi Pembangunan: Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>8</sup> Ginandjar Kartasasmita, op cit, h. 288.

<sup>9</sup> Sukamdi dalam *Warta Demografi*, ibid, h. 22.

<sup>10</sup> Ibid, h. 26.

<sup>11</sup> Ibid, h. 28-29.

- 
- 12 Di samping pembangunan berpusat pada manusia, juga berkembang strategi baru dalam pembangunan untuk  
meningkatkan partisipasi rakyat yang disebut strategi pembangunan berdimensi kerakyatan. Hal ini penting  
karena pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan kebutuhan dasar sangat sarat dengan program-  
program kebijakan *top-down*. Uraian lebih lanjut lihat D.C. Korten dan Sjahrir (penyunting). 1988.  
Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 13 Lihat Aileen Mitchell Steward. 1998. *Empowering People: Pemberdayaan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta:  
Kanisius.
- 14 Siti Oemijati Djadjanegara, dalam *Warta Demografi*, op cit, h. 7.
- 15 *Ibid*, 25.
- 16 Ginandjar Kartasasmita, op cit, h. 265-266.
- 17 Ginandjar Kartasasmita, op cit, h. 266.
- 18 Moeljarto Tjokrowinoto, op cit, h. 45-46.
- 19 Frans Seda. 1996. *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, penyunting J. Phillip  
Gobang, dkk, Jakarta: Grasindo, h. 507.
- 20 Frans Seda, *ibid*, h. 507.
- 21 Moeljarto Tjokrowinoto, op cit, h. 31-32.
- 22 Kompas, Sabtu 10 November 2001.
- 23 Kompas, Sabtu 09 Maret 2002.
- 24 Frans Seda, op cit, h. 507.
- 25 Kompas, Sabtu, 10 November 2001.
- 26 Kompas, Sabtu, 05 Mei 2001.
- 27 The Official Website of IBEC.2000. [http://www.lbec.or.id/about\\_p2.html](http://www.lbec.or.id/about_p2.html).
- 28 Kompas, Sabtu, 10 November 2001.
- 29 Moeljarto Tjokrowinoto, op cit, h. 32.
- 30 Kompas, Kamis 7 Maret 2002.
- 31 Ginandjar Kartasasmita, op cit, h. 266.